AKSYANA: JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM
Vol. 02, No. 01 September 2022, hlm. 60-77
Available at https://jurnal.unsur.ac.id/JA/index

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

Sri Wahyuningsih[1]*, A.A. Miftah[2], Mellya Embun Baining[3]
[1*]UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
[2]UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
[3]UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
*Corresponding Author e-mail: srywahyuningsih09@gmail.com
kasyfia_09@yahoo.com, mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id

Masuk: September 2022	Penerimaan: September 2022	Publikasi: September 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variable kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah 19 Dinas dalam OPD di Kota Jambi. Cara pengambilan sampel nya adalah dengan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 76 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner. Pengukuran menggunakan skala likert. Analisis data penelitian menggunakan anaisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan system informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

Kata Kunci: Kualitias Sumber Daya Manusia; Sistem Informasi Akuntansi; Komitmen Organisasi; Implementasi SAP Berbasis Akrual.

ABSTRACT

This study aims to determine how the variables influence the quality of human resources, accounting information systems, organizational commitment to the implementation of accrual-based government accounting standards partially or simultaneously. This research was conducted using quantitative methods. The population that became the unit of analysis in this study were 19 Departments of Regional Apparatus Organizations in Jambi City. The sampling method is purposive sampling technique with the number of respondents as many as 76 people. The type of data in this study is primary data. Data collection was carried out using a questionnaire instrument. Measurement using a Likert scale. Analysis of research data using multiple linear regression analysis using SPSS version 22 program. The results of this study indicate that the quality of human resources and

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

accounting information systems have a significant positive effect on the implementation of accrual-based Government Accounting Standards. Organizational commitment does not have a significant positive effect on the implementation of accrual-based Government Accounting Standards.
Keywords: *Quality of Human Resources; Accounting Information Systems; Organizational Commitment; Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards*

A. PENDUHULUAN

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun penerapan peraturan ini masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sejak 22 Oktober 2010, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang akan dimulai pada tahun 2015. Dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 pemerintah daerah mempunyai keharusan untuk menjalankan pengelolaan kuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah banyak menemukan kesulitan dalam memahami standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan implementasinya dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.(Fitrizal, 2017).

Pencatatan akuntansi pada umumnya didasarkan pada dua pendekatan, yaitu cash basis dan accrual basis. Basis akuntansi menjadipijakan penting dalam melakukan pengukuran dan penyajian setiaptransaksi dalam laporan keuangan, terutama terkait dengan pengakuanpendapatan dan beban pada setiap kejadian ekonomi. Cash basis adalah dasar pengakuan dan pencatatan pendapatan pada saat kas diterima,sedangkan dasar pengakuan dan pencatatan beban pada saat kas dikeluarkan. Accrual basis adalah dasar pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadi transaksi.(Iqbal dkk., 2017).

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan hal yang baru dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), namun hal tersebut diyakini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat diperkuat juga dari opini BPK. Kualitas terbaik dari laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(Permatasari, 2018) .

Pemerintah merencanakan agar SAP berbasis akrual paling lambat harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP akrual.

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota Jambi TA 2020 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA, serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional (LO) maupun aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.(BPK RI, 2020) Basis akrual (*accrual basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*. Penentuan hal ini untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.(Kusnadi dkk., 1999).

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup memadai agar dapat mengelolah keuangan negara yang sesuai standar. peran aparat pemerintah cukup besar agar sumber daya manusia nya berkualitas dan memadai.

Selanjutnya infrastruktur dalam penerapan akuntansi berbasis akrual juga membutuhkan sumber daya teknologi dan informasi yang besar. Informasi Akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan. Agar data keuangan yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

manajemen maupun pihak diluar perusahaan, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai. Diperlukan suatu sistem yang mengatur arus dan pengelolahan data akuntansi dalam perusahaan untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan dalam bentuk yang sesuai juga.(Sutabri, 2004).

Walikota Jambi H. Syarif Fasha melaunching Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset. Pemerintah Kota Jambi menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang pertama kali mengaplikasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset ini.

Aplikasi SIPKD merupakan fasilitas dari Kementrian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalambidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menginterpretasikan serta pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Aplikasi ini dipakai oleh Provinsi dan Kabupaten-Kota seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan pada pengelolaan keuangan daerah termasuk penataan aset.(BPK Perwakilan Provinsi Jambi, 2017).

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa perubahan yang mendasar terkait dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program atau kegiatan dalam dokumen perencanaan RKPD tahun 2021. Dalam penyusunan RKPD 2021 dan APBD 2021. Sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019, Pemerintah daerah harus melakukan penyusunan dengan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh Kementrian Dalam Negeri yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang terintegrasi.(PERMENDAGRI, 2019) Aplikasi SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Namun sampai saat ini aplikasi dimaksud belum dapat diguakan secara optimal dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Pemerintah Kota Jambi.(BPK RI, 2020).

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Kota Jambi 5 tahun berturut-turut telah berhasil memperoleh opini WTP, namun pada Tahun 2015, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Kepala BPK Provinsi Jambi Eliza mengatakan pada tahun anggaran 2015,

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

Pemerintah Kota Jambi memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Menurut Eliza ini disebabkan adanya pembatasan lingkup dalam laporan keuangan pemerintah Tahun Anggaran 2015.(Tribunjambi.com, 2016).

Tingkat Pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih rendah. Tingkat pemahaman dasar melingkup keuangan negara, bentuk pertanggung jawaban keuangan negara, standar akuntansi yang digunakan, dan subtansi standar akuntansi pemerintahan. Pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi.(Rosiana, 2016).

Faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual selanjutnya adalah Sistem Informasi Akuntansi, SIA merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah organisasi pemerintahan karena SIA menyediakan banyak informasi penting didalam membuat keputusan, seperti: perencanaan, penganggaran, pengendalian, pembuatan kebijakan,pengambilan keputusan, dll. Selain itu, SIA dapat mendukung banyak kegiatan, seperti: sistem pelaporan keuangan, sistem pemrosesan transaksidan sistem pelaporan manajemen dan SIA juga dapat digunakan untuk memproses ribuan transaksi harian untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Oleh karena itu, jika SIA lumpuh akibat bencana alam, maka akan banyak kegiatan pemerintah yang akan terganggu.(Yusmita & Evayani, 2020) Sistem Informasi Akuntansi mempunyai peranan dalam menyajikan informasi akuntansi untuk sebagai alat dalam perencanaan dan pengendalian juga pengambilan keputusan manajemen. Dengan semakin besarnya aktivitas perusahaan dan semakin banyak masalah-masalah yang timbul maka peranan sistem informasi akuntansi sebagai alat dalam membantu fungsi pimpinan perusahaan semakin penting.(Anwar, 2013).

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuan Batu menurut penelitian Aldiani (2009).Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nia Permatasari (2018) dan Rian Fitrizal (2017) menyatakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual, Tidak berpengaruhnya variabel komitmen organisasi pada penelitian ini salah satunya disebabkan karna masih kurangnya komitmen dari atasan sehingga perlu

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

dilakukan trik dan inisiatif sendiri dalam mencari informasi mengenai akuntansi basis akrual.

B. KERANGKA TEORI

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan SAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh PPK-SKPD didalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang terdiri atas 11 (sebelas) pernyataan standar.(Sudiarianti dkk., 2015) Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional Pemerintahan yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan, Pemerintah perlu penyajian efektif dan efesien dengan memperhatikan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan dalam Islam lebih ditekankan pada sikap kehati-hatian dalam menerima informasi.(Nengsih dkk., 2021).

2. Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual

a. Basis Akuntansi Kas (*Cash Basis of Accounting*)

   Basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saatkas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.(Kieso dkk., 2008).

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

b. Basis Akuntansi Akrual (*Accrual Basis of Accounting*)

Seperti yang diketahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini sudah diterapkan diseluruh Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia. Sebelum adanya PP 71 tahun 2010 (basis akrual), pemerintah sudah menerapkan PP 24 Tahun 2005 yaitu sistem akuntansi berbasis kasmenuju akrual.(Kieso dkk., 2008).

3. Akuntansi Berbasis Akrual

Basis SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.(Hasanah & Fauzi, 2017)

4. Faktor yang Mempengaruhi Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan basis akrual tidak lepas dari diterbitkannya Undang – undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. PeraturanPemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar berbasis kas. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, sumber daya manusia (SDM),komitmen, dan perangkat pendukung.(Norfaliza, 2015) Faktor organisasional adalah berkaitan tentang teknologi informasi dan dukungan konsultan, sedangkan faktor situasional antara lain seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja. Model implementasi kebijakan Edward III menyebutkan bahwa salah satu sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas pendukung. Salah satu fasilitas pendukung yang diperlukan adalah penggunaan teknologi informasi baik hardware maupun software.

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

Kompleksitas yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.(Indrawati, 2018).

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari pendidikan, pengalaman dan pelatihan dan indikator yang diukur dari Pengetahuan, Keterampilan, dan Perilaku.(Sudiarianti dkk., 2015)

6. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi yang berguna. Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin SIA adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, memproses, menganalisis, mengomunikasikan, informasi pengambilan keputusan dengan orientasi finansial yang relavan bagi pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam perusahaan.(Fauzi, 2017).

7. Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi adalah sikap karyawan yang tertari dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan diorganisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi.(Oktavianti, 2017) Selanjutnya komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu: 1. Komitmen afektif (Afective Commitment), melibatkan rasa memiliki dan terlibat didalam organisasi. 2. Komitmen kontinuans (Continuance Commitment), dimensi komitmen ini atas dasar besar kecilnya pembiayaan yang

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

akan ditanggung oleh karyawan jika meninggalkan organisasi. Tentu saja dalam hal ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan resiko yang akan diambilnya. Jadi yang menentukan komitmen adalah faktor rasional. 3. Komitmen normatif , komitmen ini lebih menekankan kepada keterlibatan perasaan dan menggambarkan dedikasi seseorang untuk tetap tinggal dan bekerja pada organisasinya.(Azman, 2015).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas yang ada di Kota Jambi. Sampel yang di pilih 1 Kepala Subbagian Keuangan, dan Staf Akuntansi/Penatausahaan Keuangan. Jumlah responden sebanyak 76 orang dari 19 Dinas yang terdapat di Pemerintah Kota Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang di isi oleh pegawai/staf di bagian bidang Keuangan di Dinas Kota Jambi.

4. Metode Analisis Data

Model dan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Model analisa regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$

Dimana :

Y = Implementasi SAP berbasis Akrual

B0 = Konstansta

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

b1, b2, b3 = Koefisien regresi

X1 = Kualitas Sumber Daya Manusia

X2 = Sistem Informasi Akuntansi

X3 = Komitmen Organisasi

e = Eror

5. Uji Validitas

Menurut (Nurdwijayanti & Sulastiningsih, 2018) Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner dalam sebuah penelitian. Hasil pengujian validitas ditunjukkan oleh suatu indeks yang menjelaskan tentang seberapa jauh alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang perlu diukur oleh kuesioner. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Untuk mempercepat pengujian validitas dibantu dengan bantuan program SPSS dengan metode korelasi (Pearson Correlation) untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X1 dan Y, variabel X2 dan Y, variabel X3 dan Y, variabel X1, X2, X3, dan Y. Pengujian validasi dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor dengan pedoman r hitung ≥ r tabel pada signifikansi 5% maka dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid.

6. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reabilitas bertujuan untuk menguji apakah angket yang digunakan dapat dipercayai atau tidak. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,06.(Sutja, 2017)

7. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Adapun uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini, karena data yang akan diikumpulkan dan diolah merupakan data cross section (data lintas individu) bukan data time series (data lintas waktu).

8. Uji Normalitas

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan Statistik Parametris, antara lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel, korelasi dan regresi analisis varian dan t-test untuk dua sampel. Penggunaan Statistik Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data.Pengujian ini menggunakan *Kolmogorof Smirnoff* dengan nilai probabilitas ≥ 0,05%, data telah terdistribusi normal.(Sugiyono, 2016)

9. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Jika ditemukan korelasi antarvariabel independen, maka adanya masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak menimbulkan masalah multikolinearitas.(Ghozali, 2011) Metode pengujian yang paling sering digunakan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi.

10. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila residual tersebut memiliki variance yang tidak sama, namun dikatakan homoskedastisitas apabila residual memiliki variance yang sama. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan denganmenggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan nilaiabsolute residual terhadap variable independen. Apabila nilai probabilitas (sig) > dari 0,05, maka tidakterjadi heteroskedastisitas.(Sutja, 2017)

11. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Uji ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, jika R2 = 100% berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, sebaliknya jika R2 = 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

terhadap variabel dependen. Nilai R2 semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen.

b. Uji T (parsial)

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable independen secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variable dependen. Lyangkah-lyangkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan penelitian ini diterima atau ditolak.
2) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis: Jika P-Value > 0,05 = menerima H0 dan menolak Ha Jika P-Value < 0,05 = menolak H0 dan menerima Ha
3) Pengambilan Keputusan

12. Uji F (simultan)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah semua variable independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi terhadap variable dependen. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.
b. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis: Jika P-Value > 0,05 = menerima H0 dan menolak Ha Jika P-Value < 0,05 = menolak H0 dan menerima Ha.
c. Pengambilan keputusan

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolineritas dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dimaksudkan agar data yang

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

diteliti tidak bias. Uji asumsi klasik untuk menguji, apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.73929266
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.087
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.815
Asymp. Sig. (2-tailed)		.520

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normaliltas yang ditampilkan dalam tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas dalam penelitian ini adalah 0,520 yang lebih besar dari 0,05 sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,641	1,560
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,568	1,759
Komitmen Organisasi (X3)	0,858	1,166

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai VIF variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2), Komitmen Organisasi (X3) VIF dibawah atau < 10 dan Tolerance Value diatas > 0,1 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dinyatakan layak

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

untuk digunakan dalam penelitian ini, karena data ini tidak terdapat kesalahan multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,607	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,856	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi (X3)	0,011	Tidak Terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari 3 variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

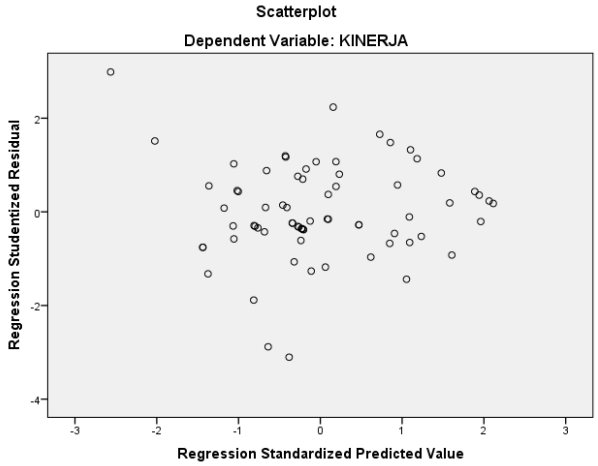

Gambar 1
Plot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas disimpulkan bahwa sebaran titik-titik berada dibawah dan diatas 0 pada Y dan tidak membentuk suatu pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

1	.717[a]	.513	.492	3.821

a. Predictors: (Constant), Total_X3, Total_X1, Total_X2

Berdasarkan tabel diatas, dipengaruhi nilai Adjusted R Square sebesar 0,492 atau 49,2% yang menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Komitmen Organisasi terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual sebesar 49,2%, dan 50,8% sisanya artinya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

e. Uji T (Uji Parsial)

Tabel 5
Hasil Uji t

Model	T	Sig.	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	1,998	0,050	Ha_1 Diterima
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	4,840	0,000	Ha_2 Diterima
Komitmen Organisasi (X3)	0,756	0,452	Ha_3 Ditolak

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai t_{hitung} dari setiap variabel yaitu sebagai berikut:

1) Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (x1) terhadap Penerapan Implementasi SAP berbasis Akrual (y) adalah 0,050 = 0,05 dan nilai t hitung 1,998 > 1,995, maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya variabel Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual
2) Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansipengaruh Sistem Informasi Akuntansi (x2) Terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual(y) berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat diperoleh dengan nilai Sig. 0,000< 0,05 dan nilai t hitung 4,840 > 1,995, maka H02 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya variabel Sisitem Informasi Akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

3) Sesuai dengan tabel diatas yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Komitmen Organisasi(x3) Terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual (y) berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat diperoleh dengan nilai Sig. 0,452> 0,05 dan nilai t hitung 0,756 < 1,995, dengan demikian H03 diterima dan Ha3 ditolak. Artinya variabel Komitmen Organisasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual

f. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 6
Hasil Uji F

Model		F	Sig.	Keterangan
1	Regression Residual Total	23,921	0,000	Ha Diterima

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2021

Dari tabel diatas nilai signifikansinya untuk Sumber Daya Manusia (x1), Sistem Informasi Akuntansi(x1), Komitmen Organisasi(x3) terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual (y) adalah 0,000 < 0,05 dan f hitung 23,921 > f tabel 2,74. Hal tersebut membuktikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh variable Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Komitmen Organisasi secara bersama-sama atau simultan terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan teori serta penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Jambi
2. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Jambi
3. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Jambi

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana

4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntasi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

REFERENSI

Anwar, S. (2013). *Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen pada PT. BPR Budisetia. 1*(2), 20.

Azman, T. (2015). Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumber daya Manusia, Infrastruktur Serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *SOROT*, *10*(1), 131. https://doi.org/10.31258/sorot.10.1.3210

BPK Perwakilan Provinsi Jambi. (2017). *SIPKD-Aset-Kota.pdf*. https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/1.SIPKD-Aset-Kota.pdf

BPK RI. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Fauzi, R. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akrual)* (1 ed.). DEEPUBLISH.

Fitrizal, R. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris pada SKPD KabupatenPesisir Selatan). *Universitas Negeri Padang*, hlm 2.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Spss*. Badan Penerbit Unoversitas Diponegoro.

Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit IN MEDIA. http//www.penerbitinmedia.co.id

Indrawati, L. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Arual pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Bandung*. *Vol. 10*(1), 11.

Iqbal, M., Himawan Bayu Patriadi, Santoso, B., Hanapi, S., & Shahir Akram Hassan. (2017). *Menemukan Kembali Paradigma Pembangunan Islami (Rediscovery the Islamic Development Paradigm)*. Pusat Kajian Pembangunan Islami Universitas Jember.

Kieso, D. E., Wegandt, J. J., & Warfield, T. D. (2008). *Akuntansi Intermediate* (12 ed.). Erlangga.

Kusnadi, Sukmalana, S., Rohaedi, Puspitasari, E., Helliana, Rohman, A., & Alim, Z. (1999). *Akuntansi Pemerintahan (Publik).* Universitas Brawijaya Malang.

Nengsih, T. A., Kurniawan, F., & Prasaja, A. S. (2021). *Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern*. *6*(1), 17–31.

Norfaliza. (2015). *Analisis Faktor Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. *2*(2), 14.

Nurdwijayanti, N. & Sulastiningsih. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM*. *vol 4*(1), 35–50.

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Oktavianti, L. (2017). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Ketersediaan Infrastruktur terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual di Kabupaten Bengkulu Tengah*. Universitas Bengkulu.

Permatasari, N. (2018). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesuksesan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh)*. Universitas Negeri Padang.

PERMENDAGRI. (2019). *PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah [JDIH BPK RI]*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019

Rosiana, E. (2016). *Pengaruh Kualitas SDM dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No 71 Tahun 2010 (Studi Kasus pada SKPD-SKPD Pemerintah Kota Malang)*. 18.

Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). *Pengaruh Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implementasinya pada Kualias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 25.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sutabri, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Sutja, A. (2017). *Penulisan Skripsi*. Wahana Resolusi.

Tribunjambi.com. (2016). *Pemkot Jambi Gagal Dapat Opini Paling Rendah dari BPK - Tribunjambi.com*. https://jambi.tribunnews.com/2016/05/30/pemkot-jambi-gagal-dapat-opini-paling-rendah-dari-bpk

Yusmita, F. & Evayani. (2020). *Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi Yang Handal Terhadap Bencana Pada Sektor Pemerintahan*. *5*(1), 9.

Copyright © 2022, Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual